



RANCANGAN LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI III DPR RI
KE PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 1 – 5 NOVEMBER 2018

I. PENDAHULUAN

o **Dasar Kunjungan Kerja**

1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. Rapat Internal Komisi III DPR RI;
3. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengenai Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan tengah.

o **Ruang Lingkup**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi III DPR RI, yaitu bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Keamanan.

o **Susunan Tim**

NO	NAMA	JABATAN/FRAKSI
1	H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.,H.,M.H	KETUA TIM /F.P.GERINDRA
2	ARTERIA DAHLAN, S.T, S.H.	ANGGOTA/F.PDIP
3	Drs. ERWIN TPL TOBING	ANGGOTA/F.PDIP
4	Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M.Hum	ANGGOTA/F.PG
5	H. JON KENEDY AZIZ, S.H	ANGGOTA/F.PG
6	Drs. BAMBANG HERI PURNAMA, ST.,M.H	ANGGOTA/F.PG
7	Dr. H.M. AZIZ SYAMSUDDIN, S.H.,S.E..M.A.F., M.H.	ANGGOTA/F.PG
8	WIHADI WIYANTO,S.H.,M.H	ANGGOTAF.P. GERINDRA
9	H.R. MUHAMMAD SYAFII, S.H.,M.Hum	ANGGOTAF.P. GERINDRA
10	DIDIK MUKRIANTO, S.H.,M.H.	ANGGOTA/F.P.DEMOKRAT
11	Ir. H. MULYADI	ANGGOTA/F.P.DEMOKRAT
10	H. MUSLIM AYUB, S.H.,M.M.	ANGGOTA/F. PAN
12	Drs. H. MUHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si	ANGGOTA/F. PKB
13	Dr.H.M. ANWAR RAHMAN, S.H	ANGGOTA/F. PKB
14	H. ABOE BAKAR AL HABSI, S.E	ANGGOTA/F. PKS
15	Drs. MUZZAMIL YUSUF, M.Si	
16	H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H	ANGGOTA/F. PPP
17	Drs. AKBAR FAISAL, M.Si	ANGGOTA/F. P. NASDEM
18	DOSSY ISKANDAR PRASETYO,S.H.,M.Hum	ANGGOTA/F. P. HANURA

Tim Kunjungan Kerja didampingi staf Sekretariat, Tenaga Ahli, TV Parlemen dan Staf Pemberitaan DPR RI, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung Mahkamah Agung, Penghubung Kementerian Hukum dan HAM serta Penghubung dari BNN.

o **Pelaksanaan Kunjungan Kerja**

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 5 (tiga) hari, yaitu tanggal 1 – 5 November 2018.

o **Objek Kunjungan Kerja**

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja di Provinsi Kalimantan tengah melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pertemuan dengan Kapolda Kalimantan tengah beserta seluruh jajarannya.
2. Pertemuan dengan Kepala BNN Provinsi Kalimantan tengah beserta seluruh jajarannya.
3. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan tengah beserta seluruh jajarannya.
4. Pertemuan dengan Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan tengah beserta seluruh jajarannya.
5. Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Provinsi Kalimantan tengah beserta seluruh jajarannya

II. HASIL KUNJUNGAN KERJA

▪ **PERTEMUAN DENGAN KAKANWIL KEMENKUM DAN HAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Dalam pertemuan tersebut Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham oleh bapak Budi Ateh memberikan paparan sebagai berikut ;

A. Bidang Anggaran

- Penjelasan terkait Realisasi Anggaran Tahun 2018, program prioritas, serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam rangka upaya optimalisasi tugas dan fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi Kalimantan Tengah. Pagu Anggaran Tahun 2018 yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah untuk 10 (sepuluh) Program yaitu sebesar Rp. 104.258.510.000,- (Seratus Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dengan realisasi per 30 Oktober 2018 mencapai Rp. 93.833.384.568,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) atau 90 %. Dengan Pagu Anggaran tersebut Kantor Wilayah akan melaksanakan kegiatan Prioritas pada masing-masing Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Administrasi Hukum Umum, Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan, Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakkan Hukum Keimigrasian, Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual, Program Pembentukan Hukum, Program Pemajuan HAM, Program Pembinaan Hukum Nasional, Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM
- Penjelsan terkait kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut Bahan Makanan (BAMA) Napi/Tahanan. Perkiraan Kekurangan anggaran Bahan Makanan (BAMA) Napi/Tahanan TA 2018 sejumlah Rp.4.519.345.571,- sedangkan Perkiraan Kekurangan anggaran Bahan Belanja Pegawai TA 2018 sejumlah Rp.2.825.025.000,-Kekurangan anggaran belanja pegawai dikarenakan penambahan jumlah pegawai.

B. Bidang Pengawasan

- Penjelasan terkait permasalahan-permasalahan dibidang Pemasarakatan yang masih terjadi seperti kelebihan penghuni (overcrowded) di Lapas/Rutan, Peredaran Narkoba di Lapas/Rutan, Napi yang melarikan diri atau kerusuhan yang terjadi di dalam Lapas/Rutan. Kendala dan strategi untuk pencegahan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan tersebut termasuk meningkatkan pengawasan terhadap kesejahteraan petugas Lapas/Rutan. Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi kelebihan penghuni di LAPAS/RUTAN di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Tengah adalah pertama mendistribusikan narapidana ke Lapas lain yang ada di wilayah Kalimantan Tengah yang belum Over Kapasitas, Mendistribusikan narapidana ke Lapas luar Kalimantan Tengah seperti Lapas Kelas I Malang Jawa Timur. Percepatan dalam hal pelayanan pembinaan berupa pemberian Remisi, Cuti Bersyarat, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas melalui aplikasi online. Memaksimalkan Lapas Higrisk, Lapas Wanita, dan Lapas Anak untuk segera dioperasikan.
- Penjelasan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi peredaran narkoba di LAPAS/RUTAN di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Tengah antara lain Pertama, melakukan razia pengeledahan gabungan serta pemeriksaan urine kepada Petugas dan WBP melalui Tim Satgas Kamtib Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, Tim Satgas Kamtib UPT Pemasarakatan, dan Instansi penegak hukum lainnya baik secara Rutin maupun Insidental. Kedua, melakukan pemeriksaan dan pengeledahan barang bawaan pengunjung maupun badan atau anggota tubuh pengunjung yang datang berkunjung ke Lapas dan Rutan. Ketiga, melakukan pemeriksaan barang dengan menggunakan alat X-Ray. Keempat, meningkatkan kewaspadaan dan melakukan pemeriksaan terhadap siapa saja yang masuk melalui pintu P2U tanpa terkecuali. Kelima, meningkatkan kualitas alat pengacak sinyal di dalam Lapas dan Rutan. dan Keenam, penambahan dana anggaran untuk rehabilitasi pidana Khusus Narkotika putusan diatas 5 (lima) tahun.
- Penjelsana upaya-upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi Napi yang melarikan diri atau kerusuhan yang terjadi di dalam LAPAS/RUTAN di wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kalimantan Tengah adalah Kebijakan dalam peningkatan keamanan di Lapas dan Rutan selalu berkoordinasi dengan pihak TNI / Polri dan BNNP salah satunya yaitu melalui kegiatan titik sambang dan pemeriksaan urine gabungan di UPT Pemasarakatan Kalimantan Tengah serta adanya kerjasama melalui sosialisasi tentang mekanisme penanganan keamanan yang meliputi kerusuhan, pelarian narapidana / tahanan, bencana alam, rehabilitasi dan penitipan benda sitaan maupun barang rampasan negara.
- Penjelasan Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam urusan kesejahteraan Petugas LAPAS/mengatasi Napi yang melarikan diri atau kerusuhan yang terjadi di dalam LAPAS/RUTAN, efektifitas Program Pembinaan dan Pemasarakatan terhadap narapidana, yakni tingkat keberhasilan dan kegagalan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan. Efektifitas Program Pembinaan dan Pemasarakatan terhadap narapidana sudah berjalan dengan baik, namun masih ada juga kegagalan yang disebabkan dari Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) itu sendiri, dimana ketika mereka sudah kembali ke masyarakat ternyata masih melakukan tindak pidana lagi. Hal ini dapat dinyatakan program tersebut belum terlaksana secara maksimal. Keberhasilan dari Program Pembinaan terhadap narapidana tidak lepas dari regulasi program CB, PB dan Litmas

yang sudah dilaksanakan secara online, sehingga proses percepatan dapat dirasakan secara maksimal oleh WBP yang mengikuti program pembinaan tersebut.

- Penjelasan mengenai kinerja Pengawasan Orang Asing di wilayah Kalimantan Tengah dan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi Pengawasan keimigrasian yang telah dilakukan dengan cara Pembentukan Tim Pora, Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Secara Mandiri , Operasi Gabungan dan Tindak Administrasi Keimigrasian. Mengingat luasnya wilayah Kalimantan Tengah mencakup 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) kota dengan jarak antara satu Kabupaten dengan Kabupaten lainnya cukup jauh dan dengan medan yang sulit di tempuh, maka sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan pengawasan orang asing dan koordinasi dengan instansi terkait kiranya dapat meningkatkan anggaran khusus di bidang pengawasan. Kinerja dalam pelayanan sistem pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan kewenangan Kanwil Kemenkumham di Provinsi Kalimantan Tengah yakni pelayanan pembuatan Paspor/e-Paspor, Bantuan Hukum, maupun pelayanan di bidang HKI dan Administrasi Hukum Umum.
- Pelayanan paspor di wilayah kalimantan tengah telah diberikan kemudahan yang berupa pelayanan berbasis IT yaitu antrian paspor online yang merupakan kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi berlaku secara Nasional, yang dapat di unduh melalui Playstore oleh masyarakat menggunakan handphone, kendala yang dihadapi belum semua masyarakat memahami penggunaan teknologi informasi. Kendala ini dapat difasilitasi dengan melakukan pelayanan secara langsung *WALK IN* (datang langsung), disamping itu Kantor Imigrasi melakukan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia bagi ibu hamil, menyusui, disabilitas dan lansia
 - Untuk penggantian paspor diberikan jangka waktu 1 hari selesai setelah melakukan pembayaran di bank
 - Penerbitan E-paspor pada saat ini belum diaplikasikan di Kantor imigrasi kelas I Non TPI Palangka Raya dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit baru di beberapa kota besar di Indonesia seperti Dki Jakarta, Surabaya, Batam, Ngarah Rai, Medan

1. Pelayanan Bantuan Hukum

Anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 608.050.000 (Enam ratus delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari Bantuan Hukum Litigasi sebesar Rp. 448.000.000 (Empat ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar Rp. 160.050.000 (Seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah)

Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Kalimantan Tengah sebagai berikut:

No	OBH	Akreditasi	Dana Litigasi		Dana Non Litigasi	
			Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Perkumpulan Sahabat Hukum Palangka Raya	C	Rp 85.000.000	Rp 80.000.000	Rp 42.680.000	Rp 16.300.000
2	Perkumpulan Eka Hapakat Sampit	B	Rp 143.000.000	Rp 113.000.000	Rp 42.680.000	Rp 560.000
3	PKBH STIH Habaring Hurung Sampit	C	Rp 80.000.000	Rp 80.000.000	Rp 32.010.000	Rp -
4	Perkumpulan LBH Barito Terbit Buntok	C	Rp 140.000.000	Rp 87.000.000	Rp 42.650.000	Rp -
JUMLAH			Rp 448.000.000	Rp 360.000.000	Rp 160.020.000	Rp 16.860.000

2. Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Anggaran untuk pelaksanaan Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 2.600.000.000,- (Dua milyar enam ratus juta rupiah) denganrealisasi capaian sebesar Rp. 1.945.760.000 (Satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan prosentase mencapai 74,83 %. Kegiatan sudah yang dilaksanakan Kantor Wilayah terkait pelayanan Administrasi Hukum Umum adalah sebagai berikut :

- Layanan Kewarganegaraan berupa Sosialisasi Peraturan Kewarganegaraan kepada masyarakat serta penerimaan permohonan kewarganegaraan
- Layanan Fidusia berupa Sosialisasi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia
- Layanan Kenotariatan berupa Rapat Koordinasi Notaris se-Kalimantan Tengah
- Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris dan PPNS di wilayah Kalimantan Tengah
- Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Sedangkan, kegiatan yang masih dilaksanakan Kantor Wilayah terkait pelayanan Administrasi Hukum Umum adalah sebagai berikut:

- Layanan Permohonan Kewarganegaraan (sampai saat ini masih nihil permohonannya)
- Layanan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Notaris dan PPNS, hingga per 31 Oktober 2018, Pelantikan Notaris sebanyak 1 orang dan Pelantikan PPNS sebanyak 5 kali. Jumlah Notaris se-Kalimantan Tengah sebanyak 107 orang
- Layanan Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris
- Untuk Layanan Publik lainnya telah dilaksanakan secara online melalui pemerintah pusat

3. Pelayanan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual

Anggaran untuk pelaksanaan Pelayanan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 567.823.000 (Lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) denganrealisasi capaian sebesar Rp. 402.572.196 (Empat ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah) dengan prosentase mencapai 70,89%

Kegiatan sudah yang dilaksanakan Kantor Wilayah terkait Pelayanan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut :

- Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual kepada mahasiswa, masyarakat, akademisi dan pelaku usaha di wilayah kabupaten Barito Selatan
- Workshop pelanggaran HKI kepada akademisi dan mahasiswa serta pelaku usaha di wilayah kota Palangka Raya
- Rapat Koordinasi terkait dengan potensi Kekayaan Daerah yang dapat dijadikan sebagai produk Indikasi Geografis wilayah Kalimantan Tengah
- Promosi dan Diseminasi terkait dengan Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Kalimantan Tengah
- Penerimaan Permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual untuk diteruskan ke Pusat

- Sosialisasi Kekayaan Intelektual Komunal di wilayah Kalimantan Tengah

Per 31 Oktober 2018, jumlah permohonan Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah pada Tahun 2018, untuk CIPTA sebanyak 53 permohonan dan Merek sebanyak 30 permohonan.

- Penjelasan terkait permasalahan dalam pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum, Pelayanan Bidang HKI, Administrasi Hukum Umum. Adalah sebagai berikut :
 - Layanan Bantuan Hukum
 - Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi maupun Non Litigasi yang masih tersisa telah dilaksanakan namun saat ini belum bisa mengajukan permohonan pembayaran karena menunggu proses addendum kontrak triwulan IV sehingga sistem aplikasi SID BANKUM ditutup sementara oleh Panitia Pengawas Pusat BPHN.
 - Layanan Administrasi Hukum Umum
 - Untuk layanan kewarganegaraan masih minimnya permohonan kewarganegaraan baik secara naturalisasi maupun permohonan kewarganegaraan karena perkawinan
 - Terbatasnya jumlah kegiatan sosialisasi maupun pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan layanan Administrasi Hukum Umum terutama di daerah Kabupaten yang ada di Wilayah Kalimantan Tengah, sehingga penyebarluasan layanan melalui media cetak dan elektronik
 - Layanan Hak Kekayaan Intelektual
 - Masih minimnya pemahaman masyarakat maupun pemerintah daerah akan pentingnya Kekayaan Intelektual
 - Terbatasnya jumlah kegiatan promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual kepada pelaku usaha maupun masyarakat di wilayah kabupaten
 - Masih minimnya pengaduan atas pelanggaran HKI di wilayah Kalimantan Tengah
 - Masih minimnya pemahaman daerah akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual Komunal Daerah untuk perlindungan
- **LEMBAGA PERADILAN SEIPROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
 - Paparan Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua-ketua Pengadilan Negeri Se-Provinsi Kalimantan tengah terkait dengan permasalahan yang ada dilingkungan pengadilan masing-masing antara lain adalah;
 - Masalah dengan Hakim yang masih minim sehingga seluruh pengadilan-pengadilan se-kalimantan tengah masih butuh penambahan hakim.
 - Masalah anggaran yang belum memadai sehingga terdapat kendala-kendala dalam kegiatan seperti kegiatan pelatihan para hakim se-kalimantan tengah.
 - Masalah sarana dan prasarana di pengadilan-pengadilan se kalimantan tengah yang masih perlu diperhatikan dan dibantu dalam anggaran dana perlengkapan sarana tersebut.
 - Masalah anggaran di PTA yang masih minim sementara wilayah tugasnya tersebut meliputi dua wilayah yang sangat luas sekali.

A. Bidang Anggaran

- Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan 8 (delapan) Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah memiliki jumlah Pagu sebesar Rp. 55.447.528.000 dengan realisasi sampai 31 Oktober 2018 sebesar Rp.47.172.313.789 atau 85,06 % yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
- Pada DIPA Badan Peradilan Umum di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya hanya terdapat Belanja Barang (akun 52) saja dengan jumlah Pagu sebesar Rp 1.824.399.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.044.785.164 (57,27%).
- Terkait dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan dalam rangka optimalisasi Tugas dan Fungsi Peradilan dan Hakim di wilayah Pengadilan Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Program IT

- Semua PN baru belum mendapatkan perangkat IT yang didukung dengan sistem kelistrikan yang baik dan penunjangnya seperti utamanya. Genset (jika terjadi pemadaman listrik), sementara tidak semua Pengadilan Negeri yang lama pun memperoleh akses yang baik terhadap IT, sementara saat ini pelayanan peradilan menggunakan sistem elektronik, padahal pelaksanaan sistem elektronik di seluruh satker pengadilan umum harus sudah selesai dan diterapkan pada tanggal 1 Juni 2019.
- Biaya operasional yang kecil/tidak memadai untuk pelaksanaan fungsi pengadilan dalam bidang IT. Contohnya masalah Kapasitas internet pada Pengadilan Tinggi palangka Raya hanya memiliki 10 mbps sedangkan untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) jauh lebih kecil lagi, hal ini mengakibatkan akses internet ke Mahkamah Agung-RI- Pengadilan Tinggi maupun antar pengadilan mendapatkan kendala hampir setiap hari dalam hal sinkronisasi yang memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama, sementara untuk Pengadilan Negeri baru (Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan Pengadilan Negeri Nangabulik) belum memiliki jaringan internet serta belum adanya provider yang berfungsi di tempat tersebut. Ini sangat mengganggu aplikasi yang berhubungan dengan fungsi pengadilan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi) dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

2. Sarana Prasarana

- Kapasitas internet pada Pengadilan Tinggi palangka Raya hanya memiliki 10 mbps sedangkan untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) jauh lebih kecil lagi, hal ini mengakibatkan akses internet ke Mahkamah Agung-RI- Pengadilan Tinggi maupun antar pengadilan mendapatkan kendala hampir setiap hari dalam hal sinkronisasi yang memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama, sementara untuk Pengadilan Negeri baru (Pengadilan Negeri Pulang Pisau, Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dan Pengadilan Negeri Nangabulik) belum memiliki jaringan internet serta belum adanya provider yang berfungsi di tempat tersebut. Ini sangat mengganggu aplikasi yang berhubungan dengan fungsi pengadilan (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi) dan SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

3. Sumber Daya Manusia

- SDM dibandingkan beban Kerja tidak seimbang, ada beberapa bagian di satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tidak memiliki staf. Kualifikasi staf perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan program prioritas Mahkamah Agung yaitu e-court.
- Menyangkut tenaga honorer dan keamanan yang membantu administrasi dan kebersihan tidak memadai.
- SDM dibandingkan beban Kerja tidak seimbang, ada beberapa bagian di satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding tidak memiliki staf. Kualifikasi staf perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan dengan program prioritas Mahkamah Agung yaitu e-court.
- Menyangkut tenaga honorer dan keamanan yang membantu administrasi dan kebersihan tidak memadai.

A. Bidang Pengawasan

- Terkait dengan jumlah pengadilan negeri diwilayah hukum pengadilan tinggi palangka raya 11 (sebelas) buah pengadilan negeri.
- Rekapitulasi Perkara Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2017 – 2018 sebagai mana tabel dibawah ini;

Per-Oktober 2018

No	JENIS PERKARA	SISA 2017	MASUK	PUTUS	CABUT	SISA
1	PIDANA	22	77	92	1	
2	PIDANA ANAK	0	1	1	0	
3	TIPIKOR	8	7	14	0	
4	PERDATA	15	67	66	4	

Tahun 2017

No	JENIS PERKARA	SISA 2016	MASUK 2017	PUTUS 2017	CABUT	SISA
1	PIDANA	8	105	88	0	22
2	PIDANA ANAK	0	5	5	0	0
3	TIPIKOR	7	22	21	0	8
4	PERDATA	18	73	76	0	15

- Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagai mana Tabel dibawah ini;

Per-Oktober tahun 2018

No	JENIS PERKARA	KASASI	PK
1	PIDANA	45	2
2	PIDANA ANAK	0	0
3	TIPIKOR	12	0

4	PERDATA	39	9
5	PHI	4	0

Tahun 2017

No	JENIS PERKARA	KASASI	PK
1	PIDANA	39	3
2	PIDANA ANAK	1	0
3	TIPIKOR	0	3
4	PERDATA	29	5
5	PHI	0	0

- Identifikasi Permasalahan Yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Eksekusi antara lain :
 1. Termohon eksekusi melaporkan ke polisi terkait yang dijadikan salah satu bukti surat oleh pemohon eksekusi dalam perkara yang bersangkutan di sangka palsu.
 2. Termohon eksekusi sudah meninggal dunia sementara tidak diketahui ahli waris dan lamatnya (perkara lama terkait ada kerusuhan etnis tahun 1999-2000) .
 3. Obyek sengketa sudah berubah karena lama proses peradilan dan pihak yang menang terlalu lama baru mengajukan permohonan eksekusi.
- Terkait dengan Ruu Jabatan Hakim dan Dukungan dalam Pelaksanaan Tugas Hakim secara Profesional dan Akuntabel sebagai berikut, Pertama, *Contempt Of Court* harus masuk dalam RUU jabatan Hakim karena sudah jelas disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung butir 4 alinea ke-4: “Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu Undang-undang yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court”. Kedua, Dalam pasal yang mengatur tentang *Contempt of Court* tersebut tentu saja harus diuraikan tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori *Contempt of Court*, bagaimana memproses apabila terjadi *Contempt of Court* dan siapa yang bisa terkena *Contempt of Court*.
- Terkait dengan sistem keamanan dan pengamanan persidangan di Indonesia masih sangat ketinggalan dari kebutuhan. Penyempurnaan perlu dilakukan, karena berbagai fakta di hampir semua Pengadilan untuk pengamanan persidangan, hanya memiliki tenaga satuan pengamanan (satpam) yang status kepegawaiannya adalah honorer. Belum semua gedung Pengadilan dirancang dengan sistem pengamanan yang memadai. Sementara Tenaga Pengamanan yang ada belum dilatih secara profesional mengenai tatacara pengamanan persidangan. Untuk itu perlu anggaran untuk beberapa tindak lanjut kerjasama, antara lain: pelatihan tentang manajemen persidangan berisiko tinggi, kesiagaan darurat, rancangan \\\gedung persidangan dan pengembangan protokol keamanan persidangan;

- Kemudian terkait dengan Rumah Negara, tidak semua hakim menerima / disediakan rumah jabatan, dan walaupun ada sebagian besar tidak layak untuk seorang pejabat negara, misalnya jalan masuk ke perumahan sempit, terletak jauh dari kantor. Fasilitas transportasi sampai sekarang, hak untuk transportasi belum diberikan, kecuali untuk pimpinan Pengadilan.

2. Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Kalteng

Pertemuan tersebut disampaikan Ketua Pengadilan Tinggi Agama oleh bapak Drs. H. Sarif Usman, SH., MH sebagai berikut ;

A. Bidang Anggaran

- Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah baik DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal, sedangkan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I meliputi Belanja Barang. Total Anggaran kedua DIPA tersebut berjumlah Rp. 37.317.044.000,00 (*tiga puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh belas juta rupiah empat puluh empat ribu rupiah*)
- Terhadap realisasi anggaran tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala, yaitu: Masih minimnya belanja modal di wilayah Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah terkait dengan proses pengadaan peralatan fasilitas kantor satker baru yang masih berjalan pada DIPA PTA Kalimantan Tengah, yaitu belanja modal AC Split dan meubelair. Yang dijadwalkan akan sudah terealisasi melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang pada awal Nopember 2018.

B. Bidang Pengawasan

- Penjelasan terkait dengan Tugas dan wewenangan Pengadilan Agama yang merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta Wakaf, zakat, infaq dan shodaqoh serta ekonomi syari'ah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Selain kewenangan diatas, Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama memberikan Istbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah*"
- Perkara yang diterima dan perkara yang diselesaikan Tahun 2018 adalah
 - a. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Se Kalimantan Tengah Tahun 2018 : Pada tahun 2018 dari rekapitulasi data yang dihimpun dari seluruh Pengadilan Agama se Wilayah PTA Kalimantan Tengah hingga akhir bulan September 2018 tercatat perkara diterima sebanyak 3785 perkara, terdiri dari sisa tahun 2017 sebanyak 478 perkara dan perkara diterima pada tahun 2018 sebanyak 3307 perkara.
 - b. Untuk melihat lebih jelas tentang keadaan perkara 2018 pada pengadilan agama se Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel Keadaan Perkara Pada Pengadilan Agama Se Kalteng

No	Uraian	Tahun 2018
1	Sisa Tahun Lalu (Tahun 2016/2017)	478
2	Terima	3.307
3	Jumlah	3.785
4	Diselesaikan/Diputus	2.989
5	Sisa Tahun /2018	796

*) Data rekapitulasi s.d bulan September 2018

- Secara rinci keadaan perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini :

Tabel Keadaan Perkara Tingkat Pertama Di Wilayah PTA. Kalteng Tahun 2018

No	Pengadilan Agama	PERKARA					Ke t
		Sisa 2017	Diterima	Dicabut	Diputus	Sisa 2018	
1	Palangka Raya	50	519	46	408	115	
2	Pangkalan Bun	146	807	40	691	222	
3	Muara Teweh	33	341	39	286	49	
4	Buntok	33	331	15	264	85	
5	Kuala Kapuas	70	426	15	363	118	
6	Sampit	146	883	52	770	207	
	JUMLAH	478	3307	207	2782	796	



- Adapun perkara yang diterima pada tahun 2018 dari seluruh pengadilan agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah sebanyak 3307 perkara terdiri dari beberapa jenis perkara sebagai berikut antara lain Bidang Perkawinan sebanyak 3237 perkara, bidang Waris sebanyak 10 perkara, Bidang Penetapan Ahli Waris sebanyak 11 perkara, Bidang P3HP sebanyak 8 Perkara Dan Lain Lain sebanyak 41 perkara, jadi Jumlah keseluruhannya sebanyak 3307 perkara.
- Terkait dengan Kendala yang dihadapi selama ini adalah ;
1. Mengingat kondisi SDM yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah saat ini sudah minim dengan terbitnya KEPRES Nomor 13 Tahun 2016 di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dibentuk 7 (Tujuh) Pengadilan Agama yang baru, maka jumlah SDM di lingkungan PTA Kalimantan Tengah semakin berkurang karena untuk mengisi sebagian Hakim dan tenaga teknisnya dalam rangka pelaksanaan operasional Pengadilan Agama baru tersebut;
 2. Anggaran untuk kebutuhan rutin operasional perkantoran masih kurang memenuhi kebutuhan riil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi menjadi tidak maksimal;

3. Masih ada beberapa gedung kantor Pengadilan Agama yang belum memenuhi standar *prototype* Mahkamah Agung, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Pengadilan Agama Buntok, sehingga wibawa Pengadilan terhadap masyarakat pencari keadilan belum maksimal ditambah lagi dengan 7 satker baru yang diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Manado pada tanggal 22 Oktober 2018 yang sekarang sudah beroperasi dengan gedung pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada pembentukan Pengadilan Agama yang baru;
4. Belum adanya mobilitas kendaraan dinas untuk satker baru yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Manado tanggal 22 Oktober 2018 sebanyak 7 satuan kerja yang sekarang sudah mulai operasional;

C. Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Kalteng

- Pertemuan tersebut disampaikan oleh Ketua PTUN Palangara bapak...pada hari Kamis tanggal 1 November 2018, antara lain ;

A. Bidang Anggaran

- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya melalui Pagu Definitif DIPA 01 Tahun 2018 sebesar Rp. 4.175.552.000,- dan DIPA 05 Tahun 2018 dengan sebesar Rp. 35.800.000,-
- Adapun daftar realisasi anggaran 2 DIPA per 31 Oktober tahun 2018 (dalam rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini;

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	Bel. Pegawai (01)	3.273.168.000,-	3.352.142.737,-	78.974.737,-	102,41
2.	Bel. Barang (01)	850,384,000,-	662.059.392,-	(188.324.608,-)	77,85
	Bel. Barang (05)	35.800.000,-	19.300.000,-	(16.500.000,-)	53,91
3.	Bel. Modal (01)	52,000,000,-	51.999.200,-	(800,-)	100,00
	Jumlah Belanja	4.211.352.000,-	4.085.501.329,-	(125.850.671,-)	97,01

- Daftar realisasi PNBP 2 DIPA per 31 Oktober tahun 2018 (dalam rupiah) sebagaimana tabel dibawah ini;

No.	Uraian	Target	Realisasi	Realisasi diatas/(dibawah) Anggaran	% Realisasi Anggaran
1.	DIPA 01	0,-	26.360.624,-	26.360.624,-	100,00
2.	DIPA 05	6.776.000,-	6.102.467,-	(673.533,-)	90,06
	Bel. Barang	6.776.000,-	32.463.091,-	25.687.091,-	100,00

(05)					
------	--	--	--	--	--

- o Dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2018 tidak terdapat kendala yang berarti dan semua dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- o Program yang menjadi **skala prioritas** adalah :
 1. Program Peningkatan manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) yang merupakan Tugas dan Fungsi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung yang merupakan pendukung tugas dan fungsi serta operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya baik itu Gaji dan Tunjangan Hakim dan Pegawai, Operasional dan Pemeliharaan Kantor baik Operasional dan Non Operasional.
 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang merupakan penunjang tugas dan fungsi seperti peralatan komputer, listrik, printer, AC dan lain-lain.

B. Bidang Pengawasan

- o Terhadap perkara – perkara yang menonjol, di PTUN Palangka Raya hingga laporan ini di buat belum pernah ada perkara yang menonjol dan menjadi perhatian masyarakat. Untuk tahun 2018 di PTUN Palangka Raya tercatat sebanyak 26 perkara yang masuk, dari jumlah tersebut, perkara Kepala Desa yang mendominasi dan selebihnya, masalah Perijinan, Kepegawaian, dan Pertanahan. Perkara yang sudah diputus tidak melebihi 5 (lima) bulan dan putusan dapat diakses/ diminta salinan putusan dalam waktu kurang dari 14 hari.
- o Mengenai kendala/hambatan sampai saat ini belum ada hambatan yang berarti, hanya masalah kepegawaian yang perlu adanya penambahan pegawai (Jumlah pegawai sebanyak 13 orang) selain para hakim (Jumlah Hakim sebanyak 8 orang).
 - a. Untuk mewujudkan kualitas, integritas, dan profesionalisme hakim dan pegawai, ketua pengadilan setiap bulan mengadakan rapat bulanan dengan dihadiri para hakim, pegawai, dan serta para honorer meminta masukan – masukan sekaligus jalan keluarnya serta menginventarisir kekurangan / hambatan yang terjadi pada bulan lalu. Khususnya kepada para hakim pegawai diwajibkan membuat laporan secara tertulis sesuai bidang masing-masing yang diawasi.
 - b. Sampai saat laporan ini di buat di PTUN Palangka Raya belum pernah terjadi adanya tindak pidana/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Namun demikian kami selaku ketua akan tetap dan selalu mengadakan pengawasan-pengawasan baik langsung / tidak langsung
- o Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Per Bulan Oktober 2018 berjumlah 21 (dua puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut :

Golongan	A	B	C	D	Keterangan
IV	-	2	-	1	3 orang
III	1	5	5	7	18 orang
II		-	-	-	0 orang
J u m l a h					21 orang

- Terkait jumlah Perkara pada Tahun 2017 adalah ;
 1. Sisa perkara tahun 2016, perkara yang masuk, putus dan dicabut pada tahun 2017 adalah ;
 - a.Sisa perkara tahun 2016 berjumlah 6 (enam) Perkara.
 - b. Perkara masuk tahun 2017 berjumlah 43 (empat puluh tiga) Perkara.
 - c.Perkara putus tahun 2017 berjumlah 28 (dua puluh delapan) Perkara.
 - d. Perkara yang dicabut tahun 2017 berjumlah 6 (enam) Perkara.
 - e.Sisa Perkara tahun 2017 berjumlah 15 (lima belas) perkara.
 2. Perkara Banding yang diajukan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 banding yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 14 (empat belas) Perkara.
 3. Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 perkara kasasi berjumlah 7 (tujuh) perkara.
 4. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Perkara PK yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 0 (nol) Perkara.
 5. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 3 (tiga) Perkara.
- Terkait Jumlah Perkara pada tahun 2018 antara lain;
 1. Sisa perkara tahun 2017, perkara yang masuk, putus dan dicabut pada tahun 2018 adalah ;
 - a. Sisa perkara tahun 2017 berjumlah 15 (lima belas) Perkara.
 - b. Perkara masuk tahun 2018 berjumlah 26 (dua puluh enam) Perkara.
 - c. Perkara putus tahun 2018 berjumlah 29 (dua puluh sembilan) Perkara.
 - d. Perkara yang dicabut tahun 2018 berjumlah 6 (enam) Perkara.
 - e. Sisa Perkara tahun 2018 berjumlah 6 (enam) perkara.
 2. Perkara Banding yang diajukan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 banding yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 17 (tujuh belas) Perkara.
 3. Perkara Kasasi yang diajukan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 perkara kasasi berjumlah 13 (tiga belas) perkara.
 4. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Perkara PK yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 6 (enam) Perkara.
 5. Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para pihak di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berjumlah 4 (empat) Perkara.

▪ **PERTEMUAN DENGAN KAJATI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Pertemuan Tim Komisi III DPR RI dengan Kepala Kejaksaan Tinggi kalteng yang disampaikan pada kamis tanggal 1 november 2018 oleh bapak...beberapa hal sebagai berikut antralain ;

A. Bidang Anggaran

- Pagu anggaran untuk Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejaksaan Negeri dan Cabang kejaksaan Negeri) tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 99.295.896.000.- (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Anggaran tersebut untuk Kejaksaan Tinggi dan 14 (empat belas) Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Cabang Kejaksaan Negeri .
- Sampai dengan 31 Oktober 2018 telah terealisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 73.980.979.890,- (tujuh puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atau sebesar 74,51 % (tujuh puluh empat koma lima puluh satu persen).
- Untuk tahun 2019, Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 86.050.767.000,- (delapan puluh enam milyar lima puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Dari pagu anggaran tahun 2019 untuk melaksanakan program – program prioritas di tahun 2019 sebagai berikut :
 - Terwujudnya penanganan perkara Pidum, Pidsus dan Pelanggaran HAM Berat secara berkualitas, cepat, tepat dan berkeadilan ;
 - Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan ;
 - Meningkatkan kepercayaan klien Kejaksaan terhadap pelayanan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ;
 - Meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kepatuhan aparatur Kejaksaan atas aturan yang berlaku baik internal dan eksternal ;
 - Tersedianya SDM Kejaksaan yang berkualitas dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik ;
 - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi Kejaksaan ;
 - Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan ;
 - Meningkatkan kesadaran hukum ;
 - Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh aparatur Kejaksaan.
- Terkait dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang hukum, pagu anggaran tahun 2019 sebesar **Rp. 86.050.767.000,-** belum memadai dan masih memerlukan penambahan anggaran untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan di Wilayah Hukum Kalimantan Tengah. Kebutuhan anggaran yang masih perlu ditambah adalah sebagai berikut :
 - Biaya belanja pegawai dan sarana prasarana serta operasional perkantoran, hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai dan struktural baru di jajaran Kejaksaan Tinggi se-Kalimantan Tengah.
 - Biaya Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan kasus intelijen dalam anggaran 2018 untuk kegiatan Lid/Pam/Gal hanya dianggarkan 18 kegiatan dengan rincian (Kejati 3 dan masing-masing Kejari/Cabjari 1 kegiatan), sampai dengan 31 Oktober 2018

Penyelidikan sebanyak 29 perkara, Pengamanan 23 kegiatan, Penggalangan 3 kegiatan, dan TP4D dianggarkan 96 kegiatan, sedangkan yang sudah dilaksanakan sebanyak 368 kegiatan.

- Minimnya biaya Penanganan Penyelesaian Perkara Pidana Umum biasa, sedangkan anggaran kontigensi sangat besar (skala prioritas nasional) sebesar Rp. 7.019.980.000,- (tujuh milyar sembilan belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) tidak dapat diserap disebabkan karena tidak ada petunjuk operasional kegiatan (POK) menyebabkan dari total pagu anggaran Tindak Pidana Umum dan Kontigensi sebesar Rp. 17.260.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan 31 Oktober 2018 baru terserap sebesar 37,45 %.
- Biaya penanganan penyelesaian perkara Pidana Khusus, Pelanggaran HAM Berat, dan Tindak Pidana Korupsi yang dianggarkan Lid 22 perkara, Dik 23 perkara, dan Tut 33 perkara, Eksekusi 21 perkara. Sampai 31 Oktober 2018 sudah dilaksanakan Lid 47 perkara, Dik 29 perkara, Tut 37 perkara, dan Eksekusi 31 perkara sehingga diperlukan penambahan anggaran, sedangkan anggaran kontigensi sangat besar (dan menjadi skala prioritas nasional) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga sampai dengan 31 Oktober 2018 penyerapan anggaran baru sebesar 47,06% yang disebabkan belum adanya petunjuk operasional kegiatan (POK).
- Biaya penanganan dan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara untuk non litigasi yang dianggarkan 79 kegiatan sedangkan sudah dilaksanakan 449 kegiatan sehingga diperlukan penambahan anggaran.

B. Bidang Pengawasan

- Penjelasan mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum di Provinsi Kalimantan Tengah adalah SPDP sebanyak 1.899 perkara, Tahap I sebanyak 1.942 perkara, Tahap II sebanyak 1.674 perkara, Penuntutan sebanyak 1.488 perkara dan eksekusi sebanyak 1.445 Terpidana.
- Penjelasan terkait Bidang Tindak Pidana Khusus Perkara yang menjadi perhatian Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pembangunan Bandara M. SIDIK/Trinsing di Kab.Muara Teweh Tahun 2014 dalam paket pekerjaan Pembangunan Landasan Pacu (Runway), Apron, Taxyway, Turning Area dan Marking dengan anggaran sebesar Rp. 16.521.570.000,- (enam belas milyar lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Terkait dengan penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagaimana table dibawah ini;

PENYELIDIKAN	KEJATI	9 PERKARA	
	Kejari se-Kalteng	38 Perkara	
Penyidikan	Kejati	4 Perkara	
	Kejari se-Kalteng	25 Perkara	
Penuntutan	Kejati	4 Perkara	Kejati 2 Perkara
			Polda 2 Perkara
	Kejari se-Kalteng	33 Perkara	Kejari 18 Perkara
			Polres 15

			Perkara
Eksekusi	Kejati	-	
	Kejari se-Kalteng	31 Perkara	

- Penyelamatan keuangan negara di Kajati Kalteng LID sebanyak Rp. 540.642.723,- DIK sebanyak Rp. 4.198.155.013,- TUT sebanyak Rp. 439.230.412,52, Denda sebanyak Rp.451.000.000,- Uang Penganti Rp. 919.337.351,80, Uang Rampasan Rp. 1.531.164.931,-, Barang Rampasan nihil, Biaya Perkara Rp. 235.000,- jadi Total keseluruhannya adalah Rp. 8.079.765.431,32.
- Penjelasan Tindak Pidana Umum mengenai perkara yang menarik perhatian masyarakat pada bidang Tindak Pidana Umum adalah Penggelapan Dalam Jabatan pada Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Eka Pabelum Itah (CU EPI) beranggotakan 6.000 anggota yang menimbulkan kerugian Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar) An. Terdakwa NONO, Cs. yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Tindak Pidana Narkotika yang ditangani Kejari Lamandau dengan barang bukti sabu-sabu seberat 7 (tujuh) Kg An. Tersangka PENDI Bin RAJJI (Alm).
- Penjelasan terkait Data Penanganan Laporan Pengaduan antara lain ;
 1. Sisa Lapdu Tahu 2017 sebanyak 12 Lapdu
 2. Masuk bulan Laporan Tahun 2018 sebanyak 5 Lapdu
 3. Diselesaikan 7 Lapdu
 4. Sisa 10 Lapdu (masih dalam proses)
 5. Hukuman disiplin Tahun 2018 4 orang (Jaksa 3 orang dan TU 1 orang)
 6. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin 13 orang (Jaksa 8 orang dan TU 5 orang)

▪ PERTEMUAN DENGAN KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH

Pertemuan Tim Komisi III DPR RI dengan Bapak IRJEN POL Drs. ANANG REVANDOKO Kapolda kalteng pada kamis 1 November 2018 memaparkan sebagai berikut ;

A. Bidang Anggaran

- Terkait dengan Realisasi Anggaran Prioritas Nasional Polda Kalteng S.D. 31 Oktober 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini;

NO	URAIAN	52 BELANJA BARANG			53 BELANJA MODAL			PAGU
		PAGU	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%	
1	ROOPS	191,026,000	191,026,000	100.0			-	191,026,000
2	DITINTELKAM	1,581,628,000	1,581,628,000	100.0			-	1,581,628,000
3	DITPOLAIR	91,135,000	91,135,000	100.0			-	91,135,000
4	SPN	708,750,000	708,750,000	100.0			-	708,750,000
5	POLRES LAMANDAU	489,160,000	486,660,000	99.5			-	489,160,000
6	POLRES KOBAR	1,143,906,000	1,023,708,200	89.5			-	1,143,906,000
7	POLRES BARUT	856,284,000	747,986,600	87.4			-	856,284,000
8	POLRES P. RAYA	3,223,755,000	2,738,435,378	84.9	950,500,000	894,580,111	94.12	4,174,255,000
9	POLRES SERUYAN	615,580,000	430,198,000	69.9	819,355,000	814,457,000	99.40	1,434,935,000
10	POLRES KATINGAN	858,052,000	727,916,000	84.8	33,135,000	32,846,000	99.13	891,187,000
11	POLRES SUKAMARA	581,642,000	465,620,000	80.1			-	581,642,000
12	POLRES GUNUNG MAS	670,060,000	528,963,500	78.9			-	670,060,000
13	POLRES MURA	569,198,000	416,260,000	73.1			-	569,198,000
14	POLRES KOTIM	1,405,170,000	1,300,271,700	92.5	3,374,873,000	2,042,751,120	60.53	4,780,043,000
15	SATBRIMOB	532,472,000	360,171,000	67.6			-	532,472,000
16	POLRES PULANG PISAU	775,672,000	740,265,000	95.4	630,856,000	170,351,000	27.00	1,406,528,000
17	DITRESKRIMUM	442,000,000	265,480,710	60.1			-	442,000,000
18	DITRESNARKOBA	841,294,000	501,036,800	59.6			-	841,294,000
19	POLRES BARSEL	560,588,000	511,395,000	91.2	20,663,205,000	11,923,375,366	57.70	21,223,793,000
20	DITSABHARA	67,200,000	32,314,100	48.1			-	67,200,000
21	ROSARPRAS	-	-	-	20,711,708,000	6,762,877,970	32.65	20,711,708,000
22	POLRES KAPUAS	1,231,583,000	1,158,616,800	94.1	13,219,836,000	3,552,917,700	26.88	14,451,419,000
23	POLRES BARTIM	694,720,000	401,169,900	57.7	11,419,519,000	2,584,947,105	22.64	12,114,239,000
Grand Total		18,130,875,000	15,409,007,688	84.99	71,822,987,000	28,779,103,372	40.07	89,953,862,000

- o Adapun realisasi anggaran rutin sampai dengan 31 oktober 2018 adalah sebagaimana tabel dibawah ini;

NO	SATKER	TOTAL		
		PAGU	REALISASI	%
1	DITSABHARA	20,543,998,000	22,183,375,574	108.0
2	SATBRIMOB	55,133,765,000	57,691,424,958	104.6
3	ITWASDA	3,483,638,000	3,383,899,605	97.1
4	DITINTELKAM	19,660,501,000	18,778,625,848	95.5
5	DITPAMOBVIT	7,970,781,000	7,578,921,301	95.1
6	DITRESNARKOBA	7,298,127,000	6,931,138,587	95.0
7	BIDKEU	1,674,540,000	1,529,016,274	91.3
8	SPRIPIIM	7,355,357,000	6,705,787,421	91.2
9	DITRESKRIMUM	9,079,750,000	8,251,414,947	90.9
10	RORENA	3,686,597,000	3,343,372,933	90.7
11	BIDPROPAM	6,105,749,000	5,486,035,640	89.9
12	DITPOLAIR	20,118,837,000	17,928,343,082	89.1
13	SPN	13,849,558,000	12,333,922,176	89.1
14	DITBINMAS	4,478,061,000	3,974,518,090	88.8
15	BIDDOKKES	8,859,458,000	7,401,164,708	83.5
16	BID TI	3,691,618,000	3,032,522,372	82.1
17	DITLANTAS	15,223,186,000	12,475,304,263	81.9
18	RO SDM	7,992,227,000	6,485,154,026	81.1
19	YANMA	5,066,817,000	4,075,722,366	80.4
20	DITRESKRIMSUS	10,096,347,000	7,976,060,392	79.0
21	ROOPS	11,569,243,000	8,879,751,914	76.8
22	ROSARPRAS	42,950,835,000	30,503,943,943	71.0
23	RUMKIT BHAYANGKARA	22,534,146,000	15,655,531,210	69.5

B. Bidang Pengawasa

n

- o Kapolda kalteng menjelaskan terkait menghadapi Pemilu Presiden dan legislative telah menyiapkan pengamanan dengan istilah KUAT PAM Polda beserta seluruh Polres dan Jajaran se-Kalimantan Tengah berjumlah sebanyak 4.660 orang personel yang terdiri dari 2/3 Kuat Polda sebanyak 1.640 personel dan 2/3 Kuat Polres dan Jajarannya sebanyak 3.020 personel. Sementara KUAT PAM TNI sebanyak 3.103 personil atau sebanyak 2/3 dari KUAT POLRI.
- o Sementara DPT Se-Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 1.713.267 Jiwa, Jumlah TPS sebanyak 8.049 TPS, kemudian TPS aman sebanyak 6.201 TPS, TPS Rawan 1 sebanyak 1.738 TPS, TPS Rawan 2 sebanyak 44 TPS, TPS Khusus sebanyak 4 TPS.
- o Kapolda Kalteng menjelaskan terkait Indikator kesiapan pemilu di wilayah Provinsi Kalteng antara lain;
 1. Siap Pilun adalah kesiapan seluruh produk administrasi/ dokumen yang mendukung kegiatan
 2. Siap Posko adalah kesiapan ruangan digunakan sbg pusat pengendalian beserta sarprasnya
 3. Siap Latpraops adalah kesiapan satwil untuk melaksanakan pelatihan berupa teori dan praktik
 4. Siap Kondisi kamtibma adalah kesiapan kesatuan untuk melaksanakan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian
 5. Siap Masyarakat adalah kesiapan kesatuan berdayakan masy lalui giat polmas tingkatkan peran serta masyarakat.
 6. Siap Kuat pers adalah kesiapan kemampuan dan perlengkapan hadapi tiap ancaman/ guan kamtibmas
 7. Siap Sarpras adalah kesiapan peralatan utama dan peralatan khusus yang digunakan
 8. Siap Anggaran adalah kesiapan anggaran utk dpt didistribusikan serta dpt dipertanggungjawabkan.

- Penjelasan terkait dengan Upaya yang dilakukan Polda Kalteng dalam menghadapi Pemilu antara lain adalah :
 1. Menjaga sinergitas, netralitas & meningkatkan koord serta komunikasi dengan *stakeholder* dalam upaya cipta situasi yang kondusif.
 2. Meningkatkan kerja sama stake holder dgn unsur 2 masyarakat utk mendukung pemilu damai th. 2019 berkualitas melalui:
 3. Bentuk jaringan komunikasi utk menukar informasi pemilu;
 4. Publikasi kegiatan pam & upaya pemilu damai;
 5. Memberikan pencerahan personel & masy ttg perkembangan sit & regulasi pemilu;
 6. Membantu / mendukung sosialisasi regulasi & kebijakan penyelenggara pemilu;
 7. Mengadakan kegiatan-2 yang memberikan pendidikan politik untuk pemilu damai dan berkualitas;
 8. Mendorong media massa untuk mempublikasikan berimbang, tidak provokatif.
- Penjelasan terkait Upaya menangkal Hoax & Hate Speech antara lain adalah
 - Membuat video untuk mengajak cegah hoax dan hate speech utamanya terkait pilpres dan pilpres th. 2019;
 - Sosialisasi ke pok masyarakat terkait bijak bermedsos;
 - Membuat konten, meme dan narasi imbauan bijak bermedsos;
 - Seminar di lingkungan pendidikan dan talk show di tv terkait bijak bermedsos;
 - Lakukan pemanggilan dan pembinaan kepada netizen yg menyebarkan hoax dan hate speech;
 - Counter Opini terhadap berita-berita yang belum tentu benar/hoax dan hate speech;
 - Take down akun penyebar hoax/ hate speech.
- Penjelasan terkait upaya penegakan hukum dan pencegahan Tindak Pidana Terorisme dengan cara membentuk Satgas penanggulangan aksi terorisme antara lain ;
 - 1) Sub satgas lidik (intel polda, ci polres jajaran, intelkorem, bin, bais, intel kejaksaan);
 - 2) Sub satgas sidik (krimum, jpu, pn, lapas, imigrasi, inafis, labfor, dokpol, rs bhayangkara, rs doris);
 - 3) Sub satgas penindakan (brimob, raider, korem);
 - 4) Sub satgas pencegahan.
- Penjelasan terkait penegakan hukum dan pencegahan tindak pidana Narkoba antara lain :
 1. Dalam rangka Gakkum terhadap TP. Narkoba (Narkotika) Polda Kalteng beserta Jajaran telah lakukan upaya pemberantasan terhadap para pelaku pengedar gelap dan penyalahguna Narkoba di seluruh wilayah Kalteng. Pada tahun 2018 (Bulan Jan s.d. Okt 2018) Polda Kalteng telah berhasil mengungkap kasus Narkoba sebanyak 691 kasus, dengan tersangka 839 orang. Dari 691 kasus telah selesai proses Sidik sebanyak 564 kss (81,6%) sedangkan selebihnya masih dalam proses Sidik;
 2. Dalam rangka cegah terhadap TP. Narkoba (Narkotika) Polda Kalteng beserta Jajaran juga telah lakukan upaya cegah penyalahguna Narkoba dengan melaksana binlun tentang bahaya penyalahguna Narkoba thdp masy terutama thdp para pemuda/pelajar;
 3. Kendala yg dihadapi oleh Polda Kalteng dan Jajaran dalam rangka Gakkum maupun cegah thdp TP. Narkoba yaitu adanya jml pers serta dukgar dan sarpras yang masih kurang namun hal tsb bukan menjadi kendala yang berarti.

- Penjelasan terkait Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana. Siber, Tindak Pidana. Lingkungan Hidup dan SDA adalah ;
 1. Capaian kinerja Ditreskrimsus Polda Kalteng pd thn 2018 (hingga November 2018) sebagai berikut:
 - a) TP. Siber jumlah perkara 6 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 2 perkara;
 - b) TP. Korupsi jumlah perkara 14 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 7 perkara;
 - c) TP. di bidang Lingkungan Hidup dan SDA (terutama di bidang Kehutanan dan Illegal Logging) jumlah perkara 23 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 17 perkara
 2. Strategi dan langkah-langkah Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam rangka penciptaan Ketertiban dan Keamanan masyarakat, terutama terkait dengan persiapan Pam Natal dan Tahun Baru 2019 maupun Pemilu 2019 yang akan datang, sehingga tercipta suasana aman dan damai. Demikian pula upaya yg dilakukan dlm menangkal fenomena “ujaran kebencian” atau berita “hoax” yg marak terjadi yaitu melakukan patroli siber untuk menyaring berita-berita berupa tulisan maupun audio visual di dunia maya, melaks koord dgn saksi ahli untuk konten-konten yang berdampak positif akan diviralkan sedangkan yg berdampak negatif akan di “report abuse” sampai “take down” serta melakukan sosialisasi ttg dampak hukum dari postingan-postingan yg mengandung konten negatif.
 3. Dalam upaya Gakkum Ditreskrimsus Polda Kalteng telah melakukan penyelidikan dan penyidikan thdp dugaan terjadinya TP. Korupsi, TP. Siber yang terkait dengan fenomena “ujaran kebencian” atau berita “hoax” serta TP. di bidang Lingkungan Hidup dan SDA (terutama di bidang Kehutanan dan Illegal Logging) maupun kasus-kasus aktual atau menonjol lainnya. Dan sampai bulan Okt 2018 Ditreskrimsus Polda kalteng telah menangani kasus-kasus sebanyak:
 - TP. Siber jumlah perkara 11 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 5 perkara;
 - TP. Korupsi jumlah perkara 14 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 7 perkara;
 - TP. di bidang Lingkungan Hidup dan SDA (terutama di bidang Kehutanan dan Illegal Logging) jumlah perkara 23 dgn jumlah penyelesaian sebanyak 17 perkara.
 - Kendala yg dihadapi Ditreskrimsus Polda Kalteng dalam Gakkum yaitu kurangnya jumlah pers serta anggaran penyelidikan dan penyidikan pada penanganan TP. siber dan TP. di bidang Lingkungan Hidup dan SDA (terutama di bidang Kehutanan dan Illegal Logging)

▪ **PERTEMUAN DENGAN BNNP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pertemuan TIM Komisi III DPR RI dengan Kepala BNNP Provinsi Kalteng oleh Bapak Drs. Lilik Heri Setiadi, M.Si pada kamis 1 November 2018, memaparkan sebagai berikut;

A. Bidang Anggaran

- Penjelasan Kepala BNNP Kalteng mengenai Realisasi anggaran BNNP pada tahun 2018 adalah sebagaimana table dibawah ini ;

No	Bagian/Bidang	Pagu (Rp)	Realisasi	Prosentase
1.	Bagian Umum	2.297.180.000	1.862.553.544	81,08%
2.	Bidang P2M	836.947.000	675.416.230	80,70%
3.	Bidang Pemberantasan	1.161.050.000	858.015.950	73,90%
4.	Bidang Rehabilitasi	901.486.000	696.217.640	77,23%
Total		5.196.663.000	4.092.203.364	78,75%

- Kebutuhan Anggaran BNNP Provinsi Kalteng adalah sebagai berikut ;
 - 1) BNNP memerlukan alat Direction Finder (alat untuk mengetahui lokasi target dari pancaran sinyal HP) dan Cellebrite.
 - 2) Dukungan penambahan anggaran untuk pelaksanaan intelijen berbasis IT.
 - 3) BNNP Kalimantan Tengah memerlukan penambahan rapid test sebanyak 3.000 buah senilai 300 juta untuk memenuhi kebutuhan melayani masyarakat secara bertahap.
 - 4) Pengadaan videotron di bandara dan tempat strategis lainnya untuk sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba (5 unit)
 - 5) Dukungan anggaran perjalanan dinas ke kabupaten untuk kegiatan Pencegahan, Dayamas dan Rehabilitasi.
 - 6) Dukungan anggaran untuk kegiatan interdiksi dalam rangka pengawasan lalu lintas narkoba di pintu masuk melalui jalur darat, air dan udara.
 - 7) Dukungan anggaran untuk kegiatan razia terpadu di kawasan yang diduga rawan narkoba.
 - 8) Dukungan anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional bidang pemberantasan.
 - 9) Dukungan anggaran dalam rangka membangun kandang dan operasional K-9.
 - 10) Pembangunan gedung klinik BNNP Kalteng dan sarana prasarannya.
 - 11) Pengadaan ambulance bagi rujukan korban penyalahguna narkoba.
 - 12) Dukungan anggaran untuk honor sipir/petugas jaga tahanan.
 - 13) Penyediaan layanan rehabilitasi rawat inap.
 - 14) Dukungan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM

B. Bidang Pengawasan

- Penjelasan Kepala BNNP mengenai Program prioritas BNNP Kalteng Bidang Pencegahan dan Dayamas pada tahun 2018 adalah ;
 - a. Advokasi terhadap lembaga swasta, lembaga Pemerintah dan Lembaga Pendidikan.
 - b. Diseminasi informasi dengan sasaran 6% penduduk kalimantan Tengah terpapar informasi bahaya Narkoba.
 - c. Melakukan sosialisasi Inpres No. 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pelaksanaan P4GN dan Prekursor Narkotika tahun 2018-2019
 - d. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam program P4GN dengan sasaran Lingkungan Pemerintah, Swasta, Pendidikan, dan Masyarakat
 - e. Pemberdayaan Alternatif dengan melakukan pemetaan kawasan rawan narkoba dan melakukan pembinaan
 - f. Melakukan kerjasama dengan Institusi terkait dalam P4GN
- Penjelasan mengenai Program prioritas BNNP Kalteng Bidang Rehabilitas pada tahun 2018 adalah ;
 - a. Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dalam bentuk pembinaan teknis dan peningkatan mutu layanan LRIP.
 - b. Penguatan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat dalam bentuk bimbingan teknis dan peningkatan mutu layanan LRKM.
 - c. Koordinasi antar pemangku kepentingan untuk layanan pasca rehabilitasi reguler serta pelayanan rawat lanjut

- Penjelasan mengenai Program prioritas BNNP Kalteng Bidang Pemberantasan pada tahun 2018 adalah Pemetaan jaringan dan pengungkapan jaringan kasus narkoba dan Razia di tempat hiburan dan tempat lain yang dicurigai rawan narkoba.
- Upaya Pencapaian Target P4GN antara lain;
 - a. Melakukan pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di semua lingkungan pendidikan, pekerja dan masyarakat.
 - b. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan membentuk relawan dan penggiat anti narkoba.
 - c. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan narkoba.
 - d. Melakukan deteksi dini melalui tes urine pada semua lingkungan pemerintah, pendidikan, swasta, dan masyarakat.
 - e. Meningkatkan kegiatan pemetaan daerah rawan narkoba dan meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas narkoba.
 - f. Melakukan razia di tempat hiburan malam dan kawasan yang dicurigai rawan narkoba
 - g. Menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai tindak kejahatan narkoba.
 - h. Melaksanakan pengungkapan jaringan sindikat narkoba dari hasil pemetaan jaringan.
 - i. Melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Kuala Kapuas untuk penyelenggaraan layanan rehabilitasi.
 - j. Melaksanakan sinergitas dengan lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah dan Komponen Masyarakat.
 - k. Melaksanakan pendampingan dan kunjungan ke rumah-rumah (home visit) klien yang telah menyelesaikan program rehabilitasi.
 - l. Melaksanakan assesmen melalui TAT (tim assesmen terpadu) terhadap tersangka yang terjerat kasus hukum (compulsary) sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010.
- Kendala-kendala yang dihadapi BNNP Provinsi Kalteng adalah sebagai berikut;
 - a. Pada TA. 2018 terdapat beberapa mata anggaran yang diblokir dan baru dibuka pada pertengahan tahun
 - b. Wilayah hukum BNN Provinsi Kalimantan Tengah yang sangat luas dan minimnya personel yang ada.
 - c. Dari 14 kabupaten/kota baru terbentuk 2 BNN Kab/Kota dan belum mempunyai gedung sendiri, jadi ada 12 Kabupaten yang belum terbentuk.
 - d. Total personel di BNNP Kalimantan Tengah sebanyak 51 (lima puluh satu) orang masih sangat jauh dari ideal dimana DSP (Daftar Susunan Pegawai) yang seharusnya adalah 211 (dua ratus sebelas) orang.
 - e. Jumlah pegawai di BNNK Palangka Raya adalah 25 (dua puluh lima) orang masih jauh dari DSP yang seharusnya adalah 78 (tujuh puluh delapan) orang
 - f. Jumlah pegawai di BNNK Kotawaringin Barat adalah 18 (delapan belas) masih jauh dari DSP yang seharusnya adalah 78 (tujuh puluh delapan) orang.
 - g. Kegiatan di bidang rehabilitasi merupakan program berkelanjutan sehingga apabila rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap tidak tuntas maka akan berpengaruh pada program pasca rehab yang tidak tercapai.
 - h. Masih banyaknya klien yang tidak tuntas mengikuti program rehabilitasi (drop out)
 - i. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.

- j. Masih rendahnya dukungan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaan perjanjian kerja sama antara BNN dengan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah.
 - k. Lembaga rehabilitasi komponen masyarakat belum mendapat dukungan dari Pemda dalam hal peningkatan sarana dan prasarana.
 - l. Terdapat kegiatan TAT yang sulit untuk dilaksanakan, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran di bidang rehabilitasi.
 - m. Revisi anggaran bidang pemberantasan mendekati akhir tahun anggaran sehingga sulit untuk direalisasikan.
 - n. Masih adanya peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas.
 - o. BNNP Kalimantan Tengah memiliki rumah tahanan akan tetapi tidak memiliki sipir/petugas jaga tahanan.
- Koordinasi BNNP Provinsi Kalteng dengan Instansi terkait antara lain adalah sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan rapat koordinasi / sinergitas P4GN.
 - 2) Menjadi narasumber pada acara sosialisasi bahaya narkoba.
 - 3) Melibatkan instansi terkait pada kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkoba.
 - 4) Permohonan dukungan pemerintah daerah/Polda, terkait kekurangan personel dan anggaran
 - 5) Menjalin kerjasama dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, pihak swasta dan Ormas lingkup Provinsi Kalteng.
 - 6) Menjalin kerjasama dengan media cetak dan elektronik dalam upaya penyebarluasan informasi P4GN.
 - 7) Melakukan deteksi dini melalui tes urine pada instansi terkait.
 - 8) Gubernur telah membentuk tim Satgas dalam rangka mewujudkan Kalteng Bersinar.

III. Sesi Tanya Jawab dan Pendalaman Anggota TIM Komisi III DPR RI

Setelah pemaparan masing-masing Mitra Komisi III DPR RI, Pimpinan TIM Komisi III DPR RI memberikan waktu kepada anggota untuk menyampaikan Pertanyaan dan Tanggapan terhadap mitra adalah sebagai berikut;

- Kakanwil Kemenkum Ham Provinsi Kalteng:
 - Mengenai catatan - catatan terkait dengan Orang Asing (OA) di Provinsi kalteng, dimana pengawasan terhadap orang asing tersebut kurang ketat oleh penegakan hukum di Kalteng.
 - Persoalan dengan Bama, Over Kapasitas dilapas wilayah kalteng. Kemudian keinginan kakanwil agar dapat diatasi sehingga ini menjadi masukan komisi III pada saat rapat kerja dengan Mekumham di Komisi III.
- Kapolda Kalteng :
 - Polda, Catatan persoalan tindak pidana teroris di Provinsi Kalteng, apa yang ditakutkan oleh polda kalteng terhadap terorisme tersebut?
 - Mengenai masalah Ledership dan kepemimpinan di Polda Kalteng, dengan atraksi srikandi-srikandi sebelum rapat merupakan menjadikan contoh bagi polda-polda lainnya, sehingga kedepan ditingkatkan lagi.
 - Bagaimana koordinasi dengan lembaga lainnya seperti Kumham, BNNP, Kejaksaan dan lainnya.

- Kajati Provinsi Kalteng :
 - Mengapa ada yang tertangkap oleh KPK akan tetapi tidak diketahui oleh Kejaksaan Provinsi Kalteng? Maka perlu dipertanyakan kenapa bisa terjadi?
 - Terkait Atensi Kejaksaan dan Kepolisian Provinsi kalteng terkait dengan OTT yang terjadi beberapa waktu lalu, sehingga apa yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan menjadi tidak berarti selama ini.
 - Kajati, mohon masalah penindakan perlu dilakukan seperti polda. Kemudian rumah dinas jaksa-jaksa sehingga kerja baik, kerja hebat.
- Kakanwil Kumham :
 - Mengenai masalah Lapas yang selalu di katakan gudangnya narkoba?
 - Bagaimana masalah razia dilapas dan rutan selama ini ?
 - Kemudian terkait masalah tes urine petugas di lapas dan rutan Kalteng
 - Terkait uang makan dilapas, serta tunjangan petugas Lapas dan rutan.
- BNNP Kalteng :
 - Terkait masalah anggaran 5 milyar sehingga terkendala dalam penindakan narkoba, sehingga capaian tidak maksimal mengapa demikian ?
 - Konsumsi narkoba di indonesia sebanyak 214 ton, sehingga pemberantasan di imbangi dengan rehabilitas.
 - Narkoba dikalteng sudah mudah masuk dengan jalur-jalur yang ada.
- Lembaga Peradilan Kalteng :
 - Masalah berapa putusan yang paling berat di jajaran pengadilan tinggi di kalteng?
 - Berapa hukuman yang paling ringan terkait dengan putusan tindak pidana narkoba?
 - Perang narkoba merupakan tanggung jawab kita bersama terkait peredaran diperbatasan.

Jawaban Serta Tanggapan Oleh Mitra Komisi III DPR RI :

- Lembaga Peradilan :
 - Fakta dipersidangan Over kapasitas lapas, mohon bantuan komisi III penegakan narkotika di kalteng hingga sekarang tidak ada RS dan Rehabilitas khusus di kalteng.
 - Terkait dengan hukuman maksimal terkait tindak Pidana Narkotika yang telah dilakukan oleh Pengadilan di palangkaraya pernah dijatuhi hukum oleh Hakim Seumur hidup. Sementara hukuman yang paling rendah sebanyak 13 tahun, kemudian saran untuk pengguna anak-anak perlu diberika hukuman rehabilitas dan pembinaan mmaksimal.
 - Kurir narkoba yang terungkap dipersidangan yang hanya mendapat upah 1 juta dan 2 juta dengan membawa barang yang jumlahnya hanya 1 atau 2 gram. Sehingga pengadilan dituntut sesuatu akan tetapi dipihak lain tidak mendukung.
 - Ada tiga pengadilan baru yang belum mempunyai apa-apa. Pengamanan dipengadilan hanya mempunyai 3 orang satpam sementara jumlah tahanan bisa mencapai 500 orang lebih yang tidak sesuai dengan pengamanan yang ada, sementara emosi tertumpah di pegadilan, kami mohon agar diberikan tenaga honorer untuk pengamanan.

- BNNP Provinsi Kalimantan Tengah :
 - BNNP selalu menjaga sinergisitas dengan Dirnarkoba Polda jateng dan lembaga terkait.
 - Pemberdayaan alternatif dengan membentuk relawan-relawan yang sudah dibekali untuk memberikan arahan-arahan untuk memberikan ceramah.
 - Bapak Presiden sudah menanda tangani terkait aksi nasional dengan baik dengan TI, POLRI, Pemerintah daerah dengan langkah membentuk desa percontohan bebas narkoba.
 - Rekan-rekan BNNP memegang senjata gemeteran karena belum begitu terlatih dalam senjata api dan hingga sekarang sudah habis pelurunya.
 - Rehabilitas dengan melakukan Tim asesment terpadu yang meliputi Polda, Dokter dan BNNP dan direncanakan oleh gubernur dengan memberikan bantuan dana 2 milyar.
 - Kendala dalam personel di BNNP hingga sekarang bisa diatasi walaupun ada kekurangan. Tahanan narkoba di BNNP belum ada teralisnya sehingga dikhawatirkan keamanan masih minim.
 - BNNP Kalteng hanya ada 6 orang dari polri sehingga kekurangan personel dalam mengawasi narkoba.
- KAJATI Provinsi Kalimantan Tengah :
 - Terkait dengan kejadian OTT KPK yang dihadapi oleh komisi B DPRD Kalteng tentunya memalukan kami logisnya di Jakarta masalah suap yang terjadi di DPRD Kalteng, kendala kajati kalteng belum mempunyai alat penyadapan yang selama ini digunakan KPK.
 - Masalah tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan SOP, tata usaha diturunkan pangkatnya satu tingkat terendah yang melakukan tindakan tercela sehingga berefek dari penanganan perkara.
 - Kemudian pimpinan menjelaskan terkait alat sadap di Kejaksaan Agung akan tetapi ada keterbatasan, dan Undang-undang tidak mendukung penyadapan.
- Kakanwil Provinsi Kalimantan Tengah :
 - Menjelaskan terkait Lapas dan Rutan tidak pernah selesainya, kami mempunyai tugas sifatnya menerima baik itu dari kepolisian dan kejaksaan sehingga kita tidak bisa menlak dan bervariasi.
 - Terkait dengan petugas lapas dan rutan yang melakukan perbuatan tercela kami lakukan pembinaan dan penarikan dan hukuman disiplin.
 - Mengenai bahan makanan dilapas dan rutan di Provinsi Kalteng kekurangan makanan hingga 14 milyar sekian.
 - Masalah narkoba perlu di rehabilitasi maksimum sehingga dapat meringankan lapas.
 - Petugas lapas masih ada tindakan perbuatan tercela akan dilakukan penarikan dan pembinaan.
 - Kanwil kumham sudah dilakukan lapas “Suka Mara” kelas III Perempuan sebagai lapas kelas III untuk meng-cover lapas-lapas lainnya seperti narapidana dari sampit dan pangkalan bun. Lapas palangkaraya sudah dipangkas sehingga secara penanganan berlahan bisa ditangani.
 - Pimpinan membuat catatan untuk diserahkan kepada komisi III DPR sebagai masukan pada saat raker dengan Menkumham di komisi III DPRRI.

- Mohon kepada komisi III DPR RI untuk meninjau kembali PP 99 tahun 2015 sehingga ada pemberian hak terhadap narapidana. Kemudian terkait fasilitas perumahan belum direhabilitas hingga saat ini mohon perhatian bapak komisi III DPR RI.
- Polda Kalimantan Tengah :
- Kapolda menjelaskan terkait dengan penanganan terorisme di provinsi Kalteng dan masalah media sosialisasi dalam pengamanan pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten /kota, DPD pada tahun 2019 secara serentak.
 - Dirkrimsus polda dan Tim IT polda kalteng menjaring isu-isu yang ada di kalteng sehingga bisa menganalisa keamanan di kalteng.
 - Masalah sosial polda kalteng selalu mengadakan diskusi dengan teman-teman mahasiswa dalam membenahi keamanan di kalteng.
 - Terkait dengan masalah dana desa kami bekerjasama dengan kejaksaan dalam sosialisasi penggunaan dana desa sehingga dapat mengurangi penyelewengan.
 - Terkait dengan pengamanan baik tamu dari kejaksaan, pengaduan maupun tamu-tamu Pemda lainnya kami siap memberikan tinggal telpon saja kapolda dan tanpa surat keamanan akan kami berikan.

KOMISI III DPR RI